

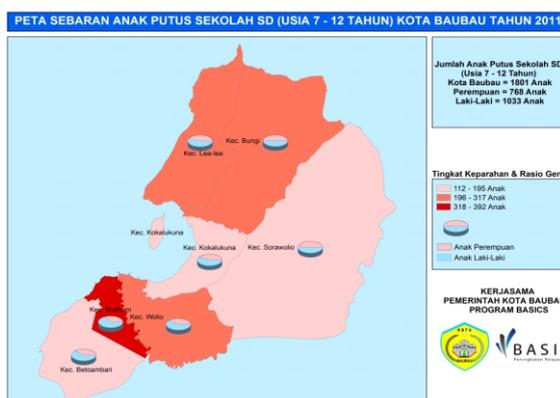
PILOTING PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG PENDIDIKAN di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara: PENGALAMAN DAN HASIL

Masalah, tantangan atau peluang

Di Kota Baubau terdapat **paradok bahwa alokasi dana untuk sektor pendidikan cukup besar namun angka putus sekolah masih cukup signifikan**. Pada tahun 2010 **alokasi anggaran** pendidikan mencapai 33% (Rp 119 M) dari total belanja APBD Rp 363 M. Pada tahun 2011 alokasi naik menjadi 35% (Rp 149 M) dari total belanja APBD Rp 431 M. Menurut hasil kajian anggaran yang dilakukan Universitas Haluoleo, alokasi anggaran pendidikan Kota Baubau untuk pendidikan dasar jumlahnya paling besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi Sultra, meski dari sisi persentase hanya masuk lima besar. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Kota Baubau terhadap pendidikan cukup baik. Malah alokasi anggaran pendidikan jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi minimal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar yaitu 20%.

Persoalannya kendati alokasi anggaran cukup tinggi namun ternyata **angka putus sekolah** pada anak usia Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) masih relatif tinggi. Jumlah anak umur sekolah yang putus sekolah tingkat SD/MI pada tahun 2011 di Kota Baubau sebesar 1801 orang dengan komposisi 768 anak perempuan dan 1033 anak laki-laki. Jumlah anak putus sekolah pada tingkat SMP/MTS di tahun 2011 sebesar 818 anak dimana 337 anak perempuan dan 481 anak laki-laki.

Peta sebaran anak putus sekolah per kecamatan di bawah ini menunjukkan bahwa **ketimpangan pemanfaatan hak pendidikan antara anak laki-laki dan anak perempuan** berlaku pada semua kecamatan. Dengan demikian jelaslah bahwa ada isu gender yang perlu ditelaah dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Penjelasan mengapa anggaran cukup tinggi namun angka putus sekolah masih tetap tinggi terjadi antara lain karena perencanaan dan penganggaran dilakukan tanpa didahului oleh analisa gender sehingga **fenomena isu gender yang ada tidak terbaca**.



Selain itu ada fenomena bahwa anak putus sekolah secara umum tinggi konsentrasinya di kelurahan yang berada di wilayah perkotaan/urban dimana akses terhadap sarana pendidikan bukan lagi menjadi masalah. Beberapa daerah pemukiman tersebut berpenghuni masyarakat miskin, tetapi perlu dicatat bahwa Pemerintah Kota Baubau telah membebaskan iuran pendidikan bagi semua anak sekolah dasar baik SD/MI dan SMP/MTs.

Langkah yang telah diambil

- 1 Pokja Gender Kota Baubau bersepakat menjadikan Dinas Pendidikan sebagai pelaksana pertama piloting perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). Hal ini didorong oleh Ketua Bappeda dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Baubau yang masing – masing merupakan ketua dan sekretaris Pokja Gender. PPRG ini diharapkan membantu para perencana untuk mengungkapkan berbagai faktor gender yang mungkin berpengaruh pada mutu dan akses layanan pendidikan sehingga lebih muda mencari solusinya.
- 2 Piloting mulai dilakukan pada tahun 2011 dengan diawali oleh perbaikan sistem pendataan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Milenium (TPM atau MDGs), dimana tentu saja angka-angka yang digunakan sedapat mungkin dipilah menurut jenis kelamin untuk mempermudah identifikasi ketimpangan gender yang mungkin ada.
- 3 Kemudian dilakukan pelatihan PPRG yang disusul oleh pendampingan. Kegiatan ini dilakukan oleh BASICS bersama dengan pemerintah provinsi Sultra. Hal yang menjadi perbedaan antara PPRG yang dilakukan di Kota Baubau dengan daerah lainnya adalah lebih difokuskan dalam rangka mencapai SPM dan MDGs. Pelatihan – pelatihan yang diadakan juga telah mengakomodir keterwakilan laki-laki dan perempuan serta materi yang tidak bias gender.
- 4 Analisa gender dilakukan untuk membantu mengidentifikasi faktor kesenjangan dan akar masalah yang turut menyebabkan capaian SPM dan MDGs masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian paradok yang terjadi dapat diketahui penyebabnya.

Apa itu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)?

Strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran dengan terlebih dahulu melakukan analisa kebutuhan dan dampak program/kegiatan dan anggaran kepada laki-laki dan perempuan

Perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan dan sedapat mungkin berupaya mengurangi kesenjangan penerima manfaat pembangunan

Perencanaan dan penganggaran yang dalam prosesnya melibatkan dan mengapresiasi suara, aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan

Perencanaan dan penganggaran yang disusun berbasis data terpilah menurut jenis kelamin baik kuantitatif maupun kualitatif yang telah dianalisa

Perencanaan dan penganggaran yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keadilan

Apa yang ditemukan dari Analisa Gender?

Angka putus sekolah lebih banyak terjadi pada anak laki-laki di kota Baubau terutama karena mereka harus membantu keluarganya untuk mencari nafkah sebagai nelayan ataupun buruh di dermaga, di tengah biaya hidup di kota yang tinggi. Pelabelan terhadap laki-laki sebagai pencari nafkah di keluarga dalam masyarakat juga turut berkontribusi terhadap terjadinya fenomena tersebut. Penerima layanan juga mengalami kesulitan untuk melanjutkan sekolah karena malu kembali ke sekolah karena sudah pernah drop out atau pun karena faktor usia. Selain itu terutama bagi anak laki-laki yang telah bekerja untuk membantu ekonomi keluarga mengalami kesulitan untuk kembali mengikuti pendidikan formal di sekolah. Oleh karenanya diperlukan alternatif lain bagi mereka.

Kompetensi dan metode pengajaran yang digunakan para guru kurang dapat membuat semua anak didik baik laki-laki maupun perempuan senang belajar di sekolah. Kompetensi guru sangat dibutuhkan terutama dalam menangkap dan merespon dinamika psikologis dan kecenderungan minat anak perempuan dan anak laki-laki. Dengan kompetensi yang dimilikinya guru dapat menggunakan variasi metode mengajar agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan.

Program/kegiatan kurang tepat sasaran akibat data yang kurang mutakhir dan belum dilakukannya analisa gender dalam perencanaan program/kegiatan. Pendidikan anak luar sekolah dan pendidikan non formal juga kurang mendapatkan perhatian dan dukungan kebijakan anggaran.

Penyelenggara layanan khususnya guru-guru masih dihadapkan pada kenyataan masih banyak yang belum memenuhi standar kompetensi. Selama ini untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi para guru harus ke tempat di luar Kota Baubau sehingga angka partisipasi guru-guru perempuan relatif rendah, padahal rasio guru perempuan jauh lebih tinggi terhadap laki-laki. Hal ini terjadi karena Pemda Baubau sendiri sebelumnya tidak mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan terkait peningkatan kompetensi guru.

Dampak dan Perubahan

- Berdasarkan hasil analisa gender / PPRG kemudian diidentifikasi program/kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan yang ada sehingga alokasi anggaran yang diperuntukkan akan lebih tepat sasaran dan lebih efektif. Pada tahun 2013 demi menjawab persoalan kompetensi guru yang menjadi salah satu indikator SPM, Baubau mengalokasikan Rp 606 juta untuk pelatihan guru agar memenuhi standar kompetensi dari sebelumnya tidak ada alokasi untuk ini. Selain itu alokasi anggaran untuk pemutakhiran data pendidikan guna menjamin keberlanjutan perencanaan berbasis data juga dialokasikan sebesar Rp 37 juta. Kemudian juga dialokasikan anggaran untuk pendidikan nonformal dan belanja untuk pendidikan luar sekolah (masing-masing sebesar Rp 91 juta dan Rp 15 juta).

- Pada sisi perbaikan sistim perencanaan, alat/dokumen seperti Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan Terms of Reference (TOR) dilampirkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) untuk menjadi acuan dalam monitoring pelaksanaan anggaran. GAP memberikan gambaran isu gender yang ada dalam pendidikan dan faktor penyebabnya sehingga diketahui alasan pentingnya sebuah program/kegiatan dibutuhkan. Sedangkan GBS menjelaskan keterkaitan antara alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan dengan isu gender yang akan diatasi serta hasil yang ingin dicapai. Kemudian dalam TOR dijelaskan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan agar dalam proses pelaksanaan program/kegiatan pun nilai kesetaraan gender tetap dilaksanakan.
- Telah terjadi perubahan pola pengumpulan data, dalam merencanakan program/kegiatan dan penganggaran, dan pola pelaksanaan program pendidikan. Sebelumnya tidak dilakukan pendataan yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pencapaian SPM. Selain itu dokumentasi yang ada juga belum semuanya menampilkan data terpilah menurut jenis kelamin. Namun sejak piloting PPRG pola pendataan relatif telah lebih baik dengan menampilkan data terpilah. Hal ini tidak saja pada data capaian SPM pendidikan tetapi juga data kesehatan. Bappeda kemudian meminta Badan Pusat Statistik untuk memastikan agar data yang dikumpulkan lembaga ini senantiasa terpilah berdasarkan jenis kelamin.
- Saat ini memang belum dapat diketahui dampak terhadap penurunan angka putus sekolah bagi anak sekolah dasar/lanjutan di Baubau baik laki-laki maupun perempuan, sebab pendataan untuk tahun 2013 belum berjalan. Namun setidaknya terdapat indikasi awal adanya perbaikan kinerja dunia pendidikan di Baubau dimana pada tahun 2012 lalu 97 orang anak (76 anak laki-laki dan 21 anak perempuan) putus sekolah yang ditangani di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) saat ini sedang mengikuti penyeteraan paket A yang akan ditamatkan pada tahun 2013 ini. Sedangkan untuk anak-anak umur Sekolah Menengah Pertama 15 orang (7 laki-laki dan 8 perempuan) dan buta aksara 207 orang (91 laki-laki dan 116 perempuan mengikuti kegiatan ini.

Pembelajaran

Kesenjangan gender tidak hanya menimpa perempuan namun bisa juga menimpa laki-laki, sebagaimana dibuktikan oleh ketimpangan dalam angka putus sekolah. Analisa gender mutlak diperlukan demi menjamin keadilan dan dampak maksimal dari pengalokasian anggaran, asal ditindaklanjuti dalam perencanaan dan penganggaran.

Dengan pengenalan alat seperti PPRG dengan cara langsung dipraktekkan pada masalah nyata, serta dengan adanya sumbangan jelas pula pada peningkatan sistim perencanaan dan penganggaran, maka alat atau praktek itu akan diminati banyak pihak lain. Di Baubau telah ada rencana untuk menerapkan PPRG secara lebih luas di kota itu.

Agar analisa ini dapat dilakukan dengan baik dan tepat maka perlu didukung oleh ketersediaan data yang memadai. Secara lebih khusus, mutlak perlu agar semua data dasar terpilah menurut jenis kelamin, suatu hal yang masih belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh.